

---

**ANALISIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN NAGARI BERPRESTASI DI  
NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

***ANALYSIS OF ACHIEVEMENT NAGARI GOVERNMENT GOVERNANCE IN  
NAGARI KINALI KINALI DISTRICT, WEST PASAMAN DISTRICT***

**Muhammad Dino<sup>1</sup>, Doni Hendrik<sup>2</sup>**

<sup>123</sup>Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas  
[muhammaddinod884@gmail.com](mailto:muhammaddinod884@gmail.com), [hendrik\\_doni@yahoo.com](mailto:hendrik_doni@yahoo.com)

**ABSTRAK** :Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut telah mengembangkan paradigma dan konsep baru mengenai tata kelola desa secara nasional. Sejalan dengan UU tersebut bahwa Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Program Nawa Cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Untuk mengelola sebuah nagari dengan penduduk yang cukup padat tentunya memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam tata kelola pemerintahan nagari berprestasi di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini menggunakan teori Tata Kelola Pemerintahan dari Loina Lalolo Krina yang terdiri dari tiga prinsip utama yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pembuatan keputusan sudah berjalan dengan baik. Bagaimana interaksi yang dijalin oleh Pemerintah Nagari Kinali dengan masyarakat untuk menerapkan prinsip akuntabilitas yang baik. Pemerintah Nagari Kinali sudah cukup Transparan dalam penyelenggaraan pemerintah nagari. Hal itu juga didukung oleh adanya website nagari. namun penggunaan website belum efektif secara keseluruhan. Jika dilihat dari partisipasi masyarakatnya, Nagari Kinali memiliki partisipasi yang cukup tinggi. Keikutsertaan masyarakat tersebut dapat dilihat dalam perencanaan pengambilan keputusan, seperti ikut aktif memberikan pendapat. Dalam pelaksanaan mereka juga ikut aktif bersama-sama misalnya pembuatan jalan. Kemudian untuk pelaporan juga kebersamaan dalam mengevaluasi LKPj dari pemerintah nagari.

**Kata kunci:** Tata Kelola, Pemerintahan, Nagari

**ABSTRACT** :Law Number 6 of 2014 concerning villages has developed a new paradigm and concept regarding village governance nationally. In line with this law, President Joko Widodo has launched the third Nawa Cita Program, namely developing Indonesia from the periphery and strengthening regions and villages within the framework of a unitary state. To manage a nagari with a fairly dense population certainly requires good governance. The aim of this research is to explain how the principles of accountability, transparency and participation are implemented in the governance of high achieving nagari in Nagari Kinali, Kinali District, West Pasaman Regency. This research uses the theory of Government Governance from Loina Lalolo Krina which consists of three main principles, namely accountability, transparency and participation. This research uses a qualitative approach with a case study method. The results of this research indicate that the decision-making process has gone well. How does the Nagari Kinali Government interact with the community to implement good accountability principles? The Nagari Kinali government is quite transparent in the administration of the nagari government. This is also supported by the existence of the nagari website. However, the use of the website has not been effective overall. If you look at community participation, Nagari Kinali has quite high participation. Community participation can be seen in planning decision making, such as actively participating in providing opinions. In its implementation, they also actively participate together, for example in road construction. Then for reporting, we also collaborate with Bamus in transmitting LKPj from the Nagari governme

**Keywords:** Governance, Government, Nagari

## A. PENDAHULUAN

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil di Negara Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Desa merupakan wilayah yang berada dibawah kekuasaan Pemerintahan Daerah, sebagaimana dalam Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa desa memiliki posisi sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut telah mengembangkan paradigma dan konsep baru mengenai tata kelola desa secara nasional. Undang-Undang ini menjadikan posisi Desa sebagai etalase negara, tidak lagi berada di posisi paling belakang. Dirumuskannya Undang-Undang Desa telah mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena diletakkan di posisi yang jarang dilirik atau diperhatikan oleh pemerintah.

Sejalan dengan UU tersebut bahwa Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Program Nawa Cita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pembangunan desa adalah suatu hal yang sangat penting dilakukan mengingat mayoritas masyarakat Indonesia bermukim di desa. Pembangunan desa atau nagari diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Maka dari itu, pembangunan yang dilakukan harus tepat sasaran dan secara merata berdasarkan nilai keadilan, sehingga nantinya benar-benar menyentuh masyarakat desa. Pada dasarnya, pembangunan memiliki dua sasaran, yaitu sasaran jangka pendek dan sasaran jangka panjang. Sasaran jangka pendek adalah merangsang masyarakat mengambil tindakan segera dan nyata, kemudian sasaran jangka panjang membentuk kepercayaan terhadap diri sendiri.

Pembangunan desa atau nagari diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Maka dari itu, pembangunan yang dilakukan harus tepat sasaran dan secara merata berdasarkan nilai keadilan, sehingga nantinya benar-benar menyentuh masyarakat desa. Pada dasarnya, pembangunan memiliki dua sasaran, yaitu sasaran jangka pendek dan sasaran jangka panjang. Sasaran jangka pendek adalah merangsang masyarakat mengambil tindakan segera dan nyata, kemudian sasaran jangka panjang membentuk kepercayaan terhadap diri sendiri ( Damanik: 2007).

Alasan utama pembangunan desa dijadikan fokus Pembangunan Nasional yaitu untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dengan cara mempercepat pembangunan desa-desa mandiri. Dewasa ini, telah terjadi pergeseran paradigma dalam desa membangun. Paradigma tersebut yaitu pemberian kewenangan berdasarkan azas rekognisi dan subsidiaritas (Kurniawan: 2015). Pembangunan desa dilakukan dengan cara memberikan pengakuan dan legalitas pada eksistensi desa. Hal ini untuk menciptakan desa mandiri berbasis pada kearifan lokal. Harapan setelah disahkannya UU tentang pembangunan desa adalah tercapainya kesejahteraan secara merata oleh masyarakat dan juga dapat mewujudkan cita-cita negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 . Hak otonom dapat membantu desa dan nagari dalam membangun sumber daya yang dimiliki dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* Akuntabel, Transparan dan Pasrtisipatif.

Untuk mendorong percepatan pembangunan antar desa, pemerintah melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2007 tentang perlombaan desa dan kelurahan. Undang-Undang ini mengisyaratkan agar antar desa terpacu melakukan pembangunan melalui persaingan secara sehat dalam kegiatan lomba yang diadakan oleh pihak pemerintah. Maksud diadakannya perlombaan desa ini adalah untuk menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa serta untuk mengetahui efektifitas dalam penyelenggaraan masyarakat. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila.

Fenomena tata kelola pemerintahan merupakan suatu kajian yang sangat menarik untuk diteliti. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh M. Fachri Adnan dan dkk dengan judul penelitian “Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintahan Nagari dalam Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan di Sumatera Barat” dalam penelitian ini peneliti menjelaskan bagaimana dampak dari program kegiatan Iptek bagi Desa Mita (IbDM) terhadap permasalahan yang dialami oleh Nagari Kamang Mudiak dan Kamang Hilia dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Penelitian yang sama tentang tata kelola pemerintahan juga dilakukan oleh Abdul Akhfar dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintah Desa Studi Pada Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar” dalam penelitian ini, peneliti berusaha menjelaskan bahwa penerapan tata kelola administrasi pemerintahan desa belum berjalan dengan baik dimana ada beberapa buku administrasi yang tidak diterapkan dan tidak lengkapnya pengisian beberapa buku administrasi desa. Selanjutnya peneliti juga menjelaskan faktor-faktor penghambatnya berupa komunikasi dan pendampingan belum dilakukan secara rutin dalam hal sumber daya maupun dari keterampilan perangkat desanya.

Berdasarkan beberapa rujukan penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini seperti penelitian sebelumnya hanya memfokuskan pada aspek partisipasi masyarakat saja dan faktor-faktor penghambat dari terwujudnya tata kelola pemerintahan di desa/nagari. Kemudian penelitian yang akan penulis lakukan ini lebih memfokuskan pada penerapan tiga prinsip *good governance* yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipatif dalam tata kelola pemerintahan Nagari Kinali. selanjutnya, penelitian ini juga dilandasi dari pengamatan peneliti terkait prestasi yang diraih oleh Nagari Kinali pada perlombaan HUT RI ke-77. Nagari kinali meraih juara umum lomba K-3 dan lomba Gapura di Pasaman Barat. Padahal nagari kinali memiliki wilayah yang cukup luas dan masyarakat yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Tentunya perlu sebuah kerja sama dan komitmen sehingga tercapainya prestasi yang diinginkan. Menurut penjelasan di atas peneliti berasumsi bahwa tata kelola pemerintahan Nagari Kinali sudah dikelola dengan baik berdasarkan prinsip *good governance*.

## **B. METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang/jasa. Hal terpenting dari suatu barang/jasa berupa kejadian/fenomenal/gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep/teori.

Metode yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu studi kasus dengan jenis intrinsik. Menurut Yin (2009) studi kasus merupakan metode yang dapat digunakan untuk menjelaskan, mendeskripsikan, atau mengeksplorasi peristiwa atau fenomena dalam konteks sehari-hari di mana peristiwa itu terjadi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi kasus untuk mendeskripsikan bagaimana Tata Kelola Pemerintahan Nagari Berprestasi di Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

## **C. PEMBAHASAN**

Dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di nagari, setidaknya ada beberapa tahapan yang perlu dijalankan oleh aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu:

### **1. Perencanaan**

Perencanaan yang dilakukan di nagari terdiri dari dokumen RPJM dan RKP Nagari. Penyusunan RPJM nagari dilaksanakan dengan berpedoman kepada RPJM Kabupaten. Perencanaan ini dilakukan oleh pemerintah nagari bersama dengan masyarakat yang diperuntukan jangka enam tahun. Dalam proses penyusunan RPJM Nagari, pemerintah harus melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan nagari atau biasa disebut Musrenbang yang diikuti oleh pihak pemerintah nagari sendiri dan unsur lapisan masyarakat.

Setelah RPJM dibentuk, maka dirumuskanlah RKP yang merupakan dokumen perencanaan nagari yang disusun pertahun. Bukan pembentukan RPJM nagari Saja yang dilakukan secara musyawarah, dalam pembuatan RKP juga dimulai dengan musyawarah Nagari, terlebih dahulu dilaksanakan musyawarah di tingkat kejurongan, dan kemudian usulan dari masing-masing kejurongan akan dibahas nantinya dalam musyawarah Nagari (Musrenbang).

## 2. Penyusunan APB Nagari

APB nagari adalah rencana keuangan tahunan nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah nagari dan Bamus Nagari. APB nagari disahkan melalui peraturan nagari yang berisikan kegiatan yang berasal dari RKP dan RPJM nagari. Rencana APB nagari sebelum disahkan menjadi sebuah peraturan nagari, terlebih dahulu disampaikan kepada Bupati melalui camat untuk dilakukan evaluasi. Pada tahap ini, Nampak adanya interaksi antara pemerintah nagari, Bamus dan Bupati melalui camat. Setelah APB nagari disahkan, selanjutnya harus disosialisasikan kepada masyarakat nagari.

## 3. Pelaksanaan Pembangunan Nagari

Setelah adanya rencana pembangunan dan aturan yang telah disepakati maka proses selanjutnya adalah eksekusi pelaksanaan program pembangunan nagari. Disini wali nagari selaku pemegang kekuasaan pemerintahan nagari, memiliki kendali penuh dalam pelaksanaan dan pengawasannya. Pembangunan yang diinginkan adalah yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di nagari sendiri dengan medayagunakan swadaya dan semangat gotong-royong masyarakat. dalam pelaksanaannya, perlu interaksi yang harmonis antara pemerintah nagari dan kelompok masyarakat agar dapat tercapainya pembangunan yang partisipatif.

## 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tahap terakhir dalam penyelenggaraan pemerintah yaitu adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada setiap akhir tahun anggaran, pemerintah Nagari wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pemerintah nagari setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut memuat berupa pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah nagari, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan, dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Terdapat tiga prinsip yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yang nantinya akan dijadikan sebagai indikator pengukur bagaimana pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Nagari Kinali. Pertama, indikator tersebut adalah akuntabilitas, peneliti menganalisis bagaimana pertanggungjawaban kinerja yang dilakukan oleh aparatur nagari, apakah sudah sesuai prosedur aturan yang dilakukan. Selanjutnya bagaimana pertanggungjawaban kinerja itu disampaikan kepada Bamus. Kedua, Transparansi indikator ini peneliti gunakan untuk menganalisis keterbukaan informasi dan pelayanan yang dilakukan di Nagari Kinali. Azas keterbukaan sangat diperlukan dalam suatu pemerintahan karenanya hal tersebut memudahkan masyarakat mencari informasi. Ketiga, partisipasi masyarakat menjadi tolak ukur bahwa tata kelola pemerintahan pada suatu nagari dikatakan baik (*good governance*). Nagari Kinali memiliki penduduk yang sangat padat untuk kategori sebuah nagari. Oleh karenanya peneliti akan menganalisis dengan jumlah penduduk yang cukup padat apakah masyarakat nagari aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pembangunan Nagari Kinali.

## Akuntabilitas

Pada tahapan sebuah program tentunya terdapat akuntabilitas didalamnya. Menurut Loina Lalolo Krina membagi akuntabilitas menjadi dua yaitu akuntabilitas pada tahap proses pembuatan keputusan dan akuntabilitas pada tahap sosialisasi program.

### 1. Akuntabilitas pada tahap proses pembuatan keputusan

Pada tahap proses pembuatan keputusan, terdapat beberapa indikator yang menjamin terwujudnya akuntabilitas publik.

a. Pembuatan keputusan dibuat secara tertulis dan tersedia bagi warga yang membutuhkan.

Pada tahap perencanaan, pemerintah Nagari Kinali membuat perencanaan dalam bentuk naskah tertulis. Tahapan pertama yang dilakukan pemerintah Nagari Kinali adalah membuat RPJM nagari. Pembuatan dokumen tersebut dibuat secara bersama-sama antara pemerintah nagari dengan masyarakat yang diwadahi oleh Bamus Nagari. RPJM sendiri merupakan pedoman untuk merumuskan RKP nagari sebagai pedoman pembangunan satu tahun ke depannya. Dalam melaksanakan sebuah program yang akan dijalankan pada satu tahun nagari perlunya membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Untuk proses perumusan RKP hal utama yang perlu dilakukan pemerintah Nagari Kinali bersama dengan lembaga Bamus, kelompok masyarakat, pendamping desa dan lapisan masyarakat lainnya melakukan Musyawarah nagari guna melakukan penyusunan rencana RKP nagari dan membentuk tim penyusun RKP Nagari. Setelah dirumuskan dalam bentuk draft rencana, setelah itu masyarakat melakukan musyawarah di jorong masing-masing bersama dengan kepala jorong. Kegiatan tersebut guna menentukan program prioritas yang akan dilaksanakan.

b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku.

Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 48 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari pasal 48 tersebut menjelaskan mengenai teknis perencanaan pembangunan yang akan dilakukan di Nagari. Pada aturan tersebut menuntun agar rencana pembangunan yang akan dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan aspirasi masyarakat Nagari. Dapat dicermati dari pembuatan keputusan sudah sesuai dengan etika dan nilai. Peneliti menggunakan dokumen RKP Nagari sebagai standar nilai dan etika untuk menganalisis. Peneliti melihat bahwa dalam pembuatan keputusan, pemerintah Nagari dan masyarakat sudah mulai menyesuaikan program yang disusun dengan standar etika dan nilai.

c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil.

Setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh nagari mempunyai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Capaian tersebut selalu bertolak dari visi misi Nagari Kinali yang telah ada sebelumnya. Kemudian tujuan dan sasaran yang ingin kita capai tersebut sesuai dengan apa yang telah dirumuskan sebelumnya pada RPJM dan RKP Nagari.

Pengajuan usulan atau saran terkait pembangunan itu bisa dilakukan pada saat musyawarah dilakukan. Unikunya di Nagari Kinali itu ada sebuah agenda kegiatan rutin yang dilakukan oleh Nagari tersebut namanya *Coffe Morning*. Kegiatan tersebut dilakukan setiap hari jumat pagi dimulai pada pukul 08.00 wib sampai selesai, pada kegiatan tersebut masyarakat akan berkumpul bersama pejabat Nagari, Bamus, Kepala Jorong dan lembaga masyarakat nagari lainnya di Aula Kantor Nagari sambil diskusi dan ditemani segelas kopi hitam hangat. Kegiatan itu juga sebagai wadah evaluasi mingguan terhadap kinerja pemerintah nagari, masyarakat juga diberikan kesempatan memberikan kritik dan saran untuk pembangunan nagari ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan Nagari.

c. Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dan konsekuensi jika standar tersebut tidak terpenuhi.

Idealnya supaya standar sasaran terpenuhi pemerintah dapat menetapkan mekanisme dan konsekuensi apabila standar tidak terpenuhi. Pemerintah Nagari Kinali tidak menetapkan standar tertentu untuk menjamin suatu program berjalan atau tidak. Keberadaan standar mekanisme dan konsekuensi dapat membantu masyarakat dalam melihat sejauh mana keberhasilan pemerintah menjalankan program yang telah direncanakan sebelumnya. Jika tidak ada standar mekanisme yang

harus dicapai, masyarakat tidak dapat melihat pertanggungjawaban pemerintah Nagari dalam pelaksanaan program yang telah dilakukan. Kemudian masyarakat juga tidak dapat memberikan konsekuensi jika standar tersebut tidak terpenuhi oleh pemerintah karena standar terpenuhi atau tidaknya suatu program tidak diatur secara jelas.

## 2. Akuntabilitas pada Tahap Sosialisasi Kebijakan

Dalam tahap sosialisasi, pemerintah nagari yang bersangkutan diharapkan mampu mensosialisasikan atau memberi tahu kepada masyarakat terhadap program yang telah direncanakan, sehingga dalam pelaksanaannya program tersebut lebih mudah dilakukan tanpa ada hambatan.

### a. Penyebarluasan Informasi Mengenai Suatu Keputusan.

Perencanaan yang telah difinalisasi secara tertulis, segera diinformasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahuinya. Pemerintah Nagari memiliki tanggung jawab penuh terhadap hal tersebut. Penyebaran informasi mengenai suatu keputusan yang telah diambil sebelumnya, pemerintah Nagari Kinali sendiri melakukannya secara tertulis kepada Kepala Jorong, kemudian kepala jorong tersebut yang menyampaikan kepada warganya. Ada juga yang dilakukan ketika ada musyawarah di Aula Nagari dan informasi dari satu warga ke warga lainnya.

### b. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara mencapai sasaran suatu program.

Peneliti menyimpulkan bahwa akurasi dan kelengkapan informasi, pemerintah Nagari Kinali menyusun dengan rinci mulai dari perencanaan program, penganggaran dan teknis pelaksanaannya. Namun dalam perencanaan pembangunan selalu berdasarkan RKP yang telah disepakati, tidak ada perubahan atau penambahan program pembangunan. tapi dalam hal penganggaran biasanya dikaji ulang seperti RAB, perubahan Rencana Anggaran Biaya Karena ada beberapa harga yang berubah atau kendala lainnya.

### c. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.

Suatu keharusan sebenarnya bagi pemerintah nagari yang bersangkutan memberikan akses terhadap masyarakat yang mau mengetahui informasi atau terkait suatu keputusan. Akan tetapi di Nagari Kinali peneliti melihat hal itu memang sudah dilakukan, misalkan ada yang mau melihat dokumen tertulis RKP atau RPJM untuk keperluan penelitian atau terkait hal penting lainnya, pemerintah Nagari Kinali akan memperlihatkankannya. Namun masyarakat yang ingin mengetahui hal tersebut harus datang ke kantor Wali Nagari Terlebih dahulu. Penyediaan informasi secara online telah dilakukan oleh pemerintah Nagari Kinali.

### d. Ketersediaan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Terkait adanya sistem informasi manajemen di Nagari Kinali itu sudah ada. Keadaan kondisi media internet sudah cukup baik dan bagus di Nagari Kinali sehingga memungkinkan Pemerintah Nagari Kinali memiliki kemampuan untuk mengelola sebuah sistem informasi manajemen secara online. Hal ini juga didukung dengan kondisi internet yang cukup baik di daerah Nagari Kinali. dengan adanya sistem ini dapat mempermudah pemerintah Nagari dalam melakukan pelaporan keuangan yang dikelola.

## Transparansi

Akses keterbukaan merupakan salah satu prinsip yang harus ada dalam tata kelola pemerintahan. Perwujudan transparansi tersebut dapat memberikan kemudahan dan kebebasan terhadap masyarakat untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan.

a. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab.

Dalam proses perencanaan, Pemerintah Nagari Kinali melakukan perencanaan terkait biaya-biaya yang dikeluarkan dan alokasi biaya tersebut kemana saja secara rinci dan jelas. Karena memang itu adalah bagian dari tuntutan regulasi yang ada. Seperti dalam RPJM nagari, di dalamnya termuat anggaran yang akan dikeluarkan dan program apa saja yang dijalankan. Selanjutnya dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Nagari juga dilakukan seperti hal tersebut untuk pembangunan dan kerja pemerintah nagari selama satu tahun ke depannya. Agar masyarakat mengetahuinya, informasi tersebut dapat dilihat pada papan informasi yang disediakan oleh pemerintah nagari.

b. Kemudahan akses informasi.

Kemudahan akses informasi dapat diartikan bahwa setiap individu dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka perlukan. Penyediaan *website* merupakan langkah yang tepat dimana pemerintah Nagari Kinali dapat menyampaikan seluruh informasi yang lengkap mengenai data dan informasi mengenai perkembangan nagari. Kemudahan bagi masyarakat Nagari Kinali sendiri, mereka tidak perlu ke kantor terlebih dahulu untuk menanyakan informasi yang mereka butuhkan. selain itu, dengan adanya *website* semua orang baik masyarakat Nagari Kinali sendiri ataupun orang luar yang membutuhkan data mengenai Nagari Kinali untuk penelitian atau suatu hal mereka cukup mengunjungi *website* nagari yang telah disediakan.

c. Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama dengan media massa dan lembaga pemerintah.

Selain mempermudah akses informasi bagi masyarakat, perlu juga dilakukan kerja sama dengan pihak lainnya guna menunjang arus informasi yang semakin baik. Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai “*watchdog*” atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari para aparat birokrasi. Pemerintah Nagari Kinali sudah berkerja sama dengan salah satu media cetak sebagai penunjang arus informasi kepada publik. Setiap ada informasi atau program yang direncanakan oleh pihak nagari mereka cukup tahu dari kepala Jorong dan tetangga mereka. Kemudian dari informasi yang mereka lihat pada papan informasi yang berada di kantor nagari. Masyarakat merasa belum terlalu butuh peran dari *website* nagari karena setiap informasi yang dibutuhkan cukup sampai kepada mereka.

## Partisipasi

Selanjutnya, prinsip ketiga yang disampaikan oleh Loina Lalolo Krina dalam tata kelola pemerintahan yaitu Partisipasi. Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam kegaitan yang ada. Kegiatan tersebut dapat berupa perencanaan, pengambilan keputusan dan implementasi dari program-program yang diambil oleh nagari. Untuk menumbuhkan masyarakat yang partisipatif, pemerintah nagari harus peka dan selalu berusaha melibatkan masyarakat agar mereka merasa dibutuhkan dalam kegiatan ataupun program-program yang akan dilaksanakan oleh nagari.

a. Keterlibatan aparat melalui terciptanya nilai dan komitmen diantara aparat.

Dalam tahap perencanaan RPJM dan RKP, masyarakat selalu diikutsertakan untuk menyampaikan pendapat dan keputusan pribadi mereka. Masyarakat akan diundang untuk hadir dalam musyawarah penyusunan RKP tersebut, bahkan sebelum itu akan dilakukan terlebih dahulu penggalan gagasan guna mencari atau mengumpulkan aspirasi dari masyarakat. Nagari Kinali melakukan kegiatan penggalan gagasan untuk menampung aspirasi masyarakat yang nanti sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan RKP nagari. Setelah dilakukan penggalan gagasan, masyarakat juga diikutsertakan dalam musyawarah nagari untuk merumuskan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Nagari Kinali memang cukup aktif untuk mengikuti kegiatan musyawarah nagari, karena memang mereka merasa bahwa program pembangunan nagari harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Kemampuan masyarakat untuk terlibat

Keikutsertaan masyarakat nagari untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dapat dilihat bagaimana interaksi yang mereka jalin secara langsung dengan pihak pemerintahan nagari. Dilihat dari program pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakatnya, terjalin interaksi yang dibangun oleh pemerintah Nagari Kinali dengan masyarakat. kedua program ini cukup baik dilaksanakan pemerintah nagari, karena memang fokus pembangunan pemerintahan Nagari Kinali tidak hanya pembangunan fisik saja namun juga pemberdayaan masyarakat.

c. Akses masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

Masyarakat selalu diberikan kemudahan untuk menyampaikan pendapat dalam tiap musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah. Pada forum musyawarah, ketika diberikan waktu masyarakat langsung saja menyampaikan pendapat berdasarkan apa yang mereka sampaikan, baik itu keluhan ataupun saran pendapat kepada pemerintah nagari. tidak cukup dalam forum musyawarah saja, dalam pelaporan dan pertanggungjawaban masyarakat Nagari Kinali juga berpartisipasi.

Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa Nagari Kinali memiliki partisipasi masyarakatnya yang tinggi. Namun untuk mewujudkan Tata kelola pemerintahan tidak hanya prinsip partisipatif saja, tapi dibutuhkan juga Akuntabilitas dan Transparansi.

#### **D.PENUTUP**

Terlaksananya pembangunan yang tepat sasaran merupakan buah dari interaksi yang aktif antara pemerintah nagari dengan kelompok-kelompok masyarakat. Dialektika yang dibangun memungkinkan masyarakat dan elemen lainnya bertukar pikiran sehingga melahirkan keputusan yang berkeadilan. Itu dilakukan oleh pemerintah Nagari Kinali dengan masyarakat dalam wadah musyawarah nagari untuk menghasilkan mufakat. Melirik pada penelitian yang penulis lakukan di Nagari Kinali dengan menggunakan teori tata kelola pemerintahan dari Loina Lalolo krina yang berfokus pada tiga variabel, Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi. Penulis menyimpulkan bahwa Tata Kelola Pemerintahan Nagari Kinali sudah berjalan dengan baik.

Dinilai dari akuntabilitas, dalam proses pembuatan keputusan sudah berjalan dengan baik. Bagaimana interaksi yang dijalin oleh Pemerintah Nagari Kinali dengan masyarakat untuk menerapkan prinsip akuntabilitas yang baik. Dalam pengelola dan pelaporan keuangan sudah cukup baik karena sudah mulai secara elektronik. Pelaporan RKP pertahunnya juga selalu tepat waktu dan tidak ada keterlambatan. Bahkan mendapatkan prestasi sebagai nagari yang tertib administrasi. Dalam sosialisasi keputusan atau kebijakan yang diambil sudah cukup maju, pemerintah Nagari sudah menggunakan media internet.

Berdasarkan sudut pandang Transparansi, peneliti melihat pemerintah Nagari Kinali sudah Transparan dalam penyelenggaraan pemerintah nagari. Hal itu juga didukung oleh adanya website nagari. namun penggunaan website belum efektif secara keseluruhan. Untuk Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APBN) pertahunnya itu selalu dipajang di kantor wali dan anggaran Dana Desa juga dibuatkan balihonya setelah itu dipasangkan di tempat-tempat umum. Kemudian dokumentasi kegiatan sosialisasi dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah nagari, itu selalu di update setiap ada kegiatan yang dilakukan pada Facebook dan Instagram.

Jika dilihat dari partisipasi masyarakatnya, Nagari Kinali memiliki partisipasi yang cukup tinggi. Keikutsertaan masyarakat tersebut dapat dilihat dalam perencanaan pengambilan keputusan, seperti ikut aktif memberikan pendapat. Dalam pelaksanaan mereka juga ikut aktif bersama-sama misalnya pembuatan jalan. Kemudian untuk pelaporan juga kebersamaan dalam

mengevaluasi LKPj dari pemerintah nagari.

## E.DAFTAR PUSTAKA

- Akhfar, Abdul. 2019. "Analisis Penerapan Tata Kelola Administrasi Pemerintah Desa Studi Pada Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar". *Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau
- Damanik, Inta P.N. 2007. "Studi Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa". *Jurnal Agrofestri*, 2 (1)
- Desa Sarimekar. 2021. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Diakses dari <https://sarimekar-buleleng.opendesa.id/artikel/2021/1/3/undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa> pada 03 Mei 2023 pukul 23.00 WIB.
- Dewantara, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- DKincai, Rhian . 2022. "Nagari Kinali Wakili Pasbar Pada Penilaian Lomba PKK Tingkat Provinsi Sumbar". diakses dari <https://www.portalberitaeditor.com/nagari-kinali-wakili-pasbar-pada-penilaian-lomba-pkk-tingkat-provinsi-sumbar/> pada 12 Oktober pukul 01.30 WIB.
- Hendrawati, Erna dan Mira Pramudianti. 2020. Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*. 12 (2). 100-108
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial* . Yogyakarta: Erlangga.
- Kariadil Harefa, 2022, Profil Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumbar diakses di <https://halonusa.com/profil-nagari-kinali-kecamatan-kinali-kabupaten-pasaman-barat-sumbar> tanggal 16 November pukul 00.50 Wib
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia . 2017. Buku Pintar Dana Desa: *Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*.
- Kumorotomo, Wahyudi. 1999. *Etika Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Kurniawan, Borni. 2015. *Desa Mandiri Desa Membangun: buku 5*. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Lembaga Administrasi Negara dan BPKP, Jakarta: 2007
- Lestari, Nurmalita. Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi, Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) DPRD Kota Bandung.
- Marapipost. 2021. "Hebat! Wali Nagari Kinali Gelar Coffee Morning, Evaluasi Kinerja Sepekan" diakses dari <https://marapipost.com/index.php/2021/09/18/hebat-wali-nagari-kinali-gelar-coffee-morning-evaluasi-kinerja-sepekan/> pada 17 Mei 2023 pukul 21.00 WIB
- Sumbar, Mata. 2020. "Nagari Kinali Raih Juara 1 Kategori Transparansi Dana Desa Tingkat Sumbar" diakses dari <http://matasumbar.com/nagari-kinali-raih-juara-1-kategori-transparansi-dana-desa-tingkat-sumbar/> pada 05 Mei 2023 pukul 22.00 WIB.

- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Nugrahani, Farida. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam penelitian Pendidikan Bahasa*.
- Nurjannah, Pindy. 2020. “Tata Kelola Program dalam Mewujudkan Lembaga Berprestasi( Studi di PKBM GEMA Kota Tasikmalaya). *Skripsi*. Tasikmalaya: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pendidikan Masyarakat Universitas Siliwangi.
- Pasaman Barat dalam Angka 2022, <https://pasamanbaratkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/f83db264f78e0038435708b0/kabupaten-pasaman-barat-dalam-angka-2022> diakses pada 01 Juni 2023
- Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.
- Pertiwi dkk. 2021. Penerapan E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa ( Studi pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng). *Jurnal PRAJA*. 9 (3). 130-139.
- Putra, Hendi Sandi. 2017. Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan *Good Governance* di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik Muda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 2017. 6 (2)
- Rewansyah, Asmawi. 2012. *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*. Jakarta: PT Rizky Grafis.
- Rizalina, Yuni. 2007. Governance di Uni Eropa (Studi Kasus: Kebijakan Telecoms Package). *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada.
- Roni. 2022. “HUT RI Ke-77 Nagari Kinali Juara Umum Lomba K-3 dan Gapura di Pasbar. diakses dari <https://marapipost.com/index.php/2022/08/18/hut-ri-ke-77-nagari-kinali-juara-umum-lomba-k-3-gapura-pasaman-barat/> pada 12 Oktober 2022 pukul 01.00 WIB.
- Rosyida, Isma dan Nasdian, Ferdian Tonny. 2011. Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder dalam Penyelenggaraan Program *Corporate Social Responsibility* dan Dampaknya Terhadap Komunitas Pedesaan, *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*.
- Rusyan H.A., Tabrani. 2018. *Membangun Desa Berprestasi*. Jakarta: Bumi Aksara. Ryandono, Muhamad Nafik Hadi & Ida, Wijayanti. 2019. *Transformasi Tata Kelola Lembaga Zakat Pada Pemberdayaan Social Entrepreneur*, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 10 (1)
- Satori, Djam'an. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti, 2004. *Good Governance* Bagian kedua, Bandung: CV Mandar Maju. Sofyani, Hafiez, dkk. 2018. *Praktik Pengelolaan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa*
- Dlingo di Kabupaten Bantul: Pembelajaran dari Desa Percontohan. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*. 1 (1)
- Suhardi, 2016. “Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pemerintahan Desa Majannang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa)”. *Skripsi*., Makassar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin.

Sumarto, Hetifah Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Syamsurizaldi, dkk. 2018. Dampak Perkembangan Sumber Keuangan Nagari Terhadap Inovasi Program dan Kegiatan Pembangunan Nagari di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013-2016. *Jurnal Pembangunan Nagari* 3 (1)

Walidin, AK., Saifullah, & Tabrani. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.

Yin, Robert. K. 2002. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yin, Robert. K. 2009. *Studi Kasus: Desain & Metode*. Penerjemah Mudzakir. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Yin, Robert K. 2008, *Studi Kasus Desain Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.